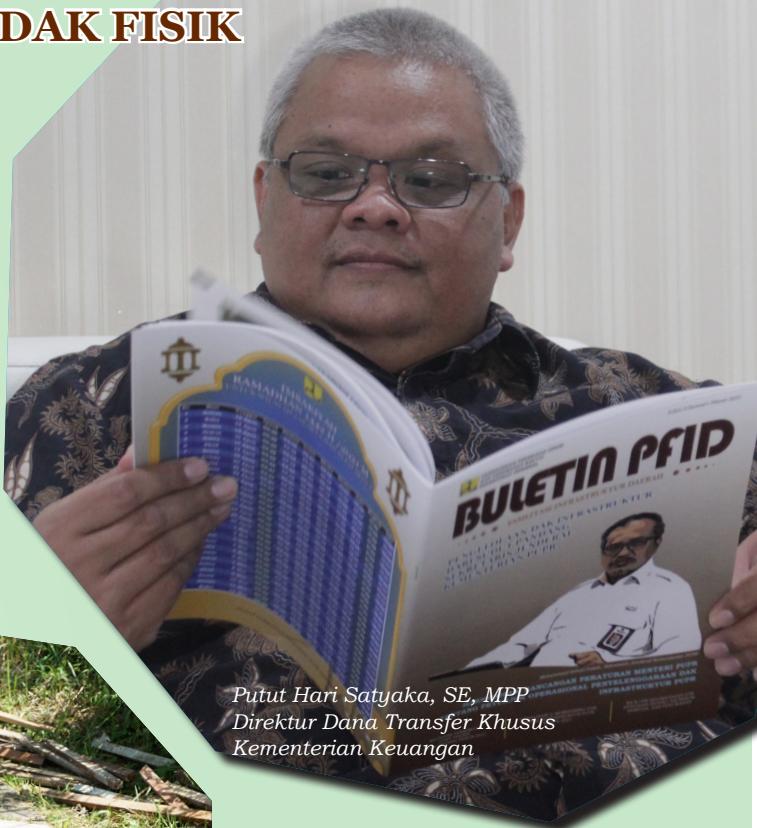




# BULETIN PFID

• • • • • FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH • • • • •

**STRATEGI PENETAPAN ALOKASI DAK FISIK  
INFRASTRUKTUR PUPR  
UNTUK PENCAPAIAN *OUTCOME*  
DAN *IMPACT* YANG SIGNIFIKAN**



Putut Hari Satyaka, SE, MPP  
Direktur Dana Transfer Khusus  
Kementerian Keuangan



**SOSIALISASI PELAPORAN  
CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
BERBASIS APLIKASI**



VERIFIKASI DATA TEKNIS  
DAN USULAN RENCANA KEGIATAN  
DAK BIDANG IRIGASI TA 2022

VERIFIKASI PROGRAM HIBAH  
JALAN DAERAH (PHJD) DAN  
*PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND  
MAINTENANCE (PRIM)*

INFOGRAFIS 2 TAHUN PFID  
MENYELENGGARAKAN DAK FISIK  
INFRASTRUKTUR PUPR

# CATATAN TIM REDAKSI

**P**usat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) bertugas untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan air; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya tugas diatas agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Buletin PFID ini berisi tentang peraturan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di PFID yaitu Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman. Buletin PFID Edisi ke-6/April-Juni Tahun 2021 ini bertema tentang Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2022, Infografis 2 Tahun Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam Menyelenggarakan DAK Fisik Infrastruktur PUPR, Wawancara dengan Direktur Dana Transfer Khusus terkait Strategi Penetapan Alokasi DAK Fisik Infrastruktur PUPR untuk Pencapaian Outcome and Impact yang Signifikan.

Selamat membaca.

Tim Redaksi

## SUSUNAN TIM REDAKSI

### **Pelindung**

Mohammad Zainal Fatah

### **Penanggung Jawab**

Riono Suprapto

### **Dewan Redaksi**

Anum Kurniawan  
Dedy Gunawan  
Nova Dorma Sirait  
Andie Pramudita Said  
Wara Novela

### **Pemimpin Redaksi**

Rosita Darmastuti

### **Anggota Redaksi**

Hidemiwan, Hery Heryana,  
Sari Satria, Desi Meriana,  
Irma Rahmawati, Indah  
Indriaspriati, Leviana Okvianty,  
Rethon M. Canopy

### **Penyunting Redaksi**

Indra Jaya KGP, Arbisani,  
Rani Nur. I, Arif Furqan

### **Bagian Produksi**

Agus Sugiono, Dewi Udiarti,  
Zamzuli, Asep Sultoni

### **Bagian Distribusi**

Eka Widya Ningtyas  
Didik Santoso

### **Kontributor**

Anum Kurniawan,  
Nova Dorma Sirait,  
Indah Indriaspriati, Irma  
Rahmawati, Leviana Okvianty  
Riza Hamidah, Indra Jaya KGP,  
Brigitta Yolanda, Rizky Ananda,  
M. Aminudin Aziz, Pujiati  
Rahayu, Frandi Sahabat,  
Ganang Saputro

### **Desain**

Prayudi Anggia

### **Alamat Redaksi**

Gedung Heritage PUPR Lt.4  
Jl. Pattimura No.20,  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan,  
12110,



021-27932834



pfid.setjen@pu.go.id



<https://setjen.pu.go.id/pfid/>



@pusatfid

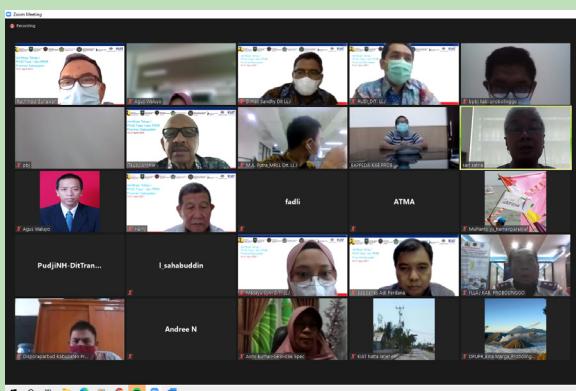
STRATEGI PENETAPAN  
ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
INFRASTRUKTUR PUPR  
UNTUK PENCAPAIAN OUTCOME DAN IMPACT  
YANG SIGNIFIKAN

5



BANTUAN TEKnis PENYELENGGARAAN  
DAK BIDANG IRIGASI TAHUN 2021  
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

13



INFOGRAFIS 2 TAHUN PUSAT  
FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH  
MENYELENGGARAKAN DAK FISIK  
INFRASTRUKTUR PUPR

20

VERIFIKASI PROGRAM HIBAH  
JALAN DAERAH (PHJD) DAN  
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND  
MAINTENANCE (PRIM)

22



VERIFIKASI DATA TEKNIS  
DAN USULAN RENCANA KEGIATAN  
DAK BIDANG IRIGASI TA 2022

10



PEMBINAAN DAN PEMBAHASAN  
USULAN DAK PADA KEGIATAN  
VERIFIKASI USULAN DAK  
BIDANG JALAN TA. 2022

16





UPDATING PELAPORAN DAK  
BIDANG AIR MINUM, SANITASI,  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
SEBAGAI SALAH SATU DASAR  
PENGALOKASIAN DAK

28

SOSIALISASI PELAPORAN CAPAIAN  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT BERBASIS  
APLIKASI

24



CAPAIAN MANFAAT PENGELOLAAN DAK WILAYAH BARAT DALAM MENDUKUNG  
PRIORITAS NASIONAL

34

EVALUASI SAKIP UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
JENDERAL  
TAHUN ANGGARAN 2020

37





**WAWANCARA :**  
**PUTUT HARI SATYAKA, SE, MPP**  
**DIREKTUR DANA TRANSFER KHUSUS**

## STRATEGI PENETAPAN ALOKASI DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR UNTUK PENCAPAIAN OUTCOME DAN IMPACT YANG SIGNIFIKAN

Oleh : Indra Jaya KGP, Pujiati Rahayu  
 Tim Buletin PFID

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Kementerian PUPR tidak terlepas dari kontribusi beberapa K/L, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 tahun 2021, bahwa penghitungan indeks teknis DAK Fisik Infrastruktur PUPR dilakukan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur PUPR dibawah naungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Hasil dari perhitungan indeks teknis harus disampaikan PFID kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan khususnya Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK), sebagai

salah satu komponen penentuan alokasi DAK.

Direktorat Dana Transfer Khusus, dibawah naungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengemban tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dan transfer khusus. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Dana Transfer Khusus memiliki fungsi diantaranya penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer khusus; penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana

transfer khusus; serta penyiapan rekomendasi penyaluran dana transfer khusus.

“Sinergitas merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan DAK Fisik. Kementerian Keuangan yang menyusun anggaran dan mentransfer anggaran tersebut, K/L Teknis bersama dengan Bappenas Sektor sebagai perencana dan melakukan penilaian usulan DAK. Pasti ada hal yg harus diingkatkan, namun saya beserta para pejabat tinggi pratama di K/L memiliki komunikasi yang akan terus berkelanjutan sebagai alat untuk mensinergikan Kinerja DTK dengan K/L Teknis lainnya”. Ucap Bapak Putut Hari Satyaka, SE, MPP selaku Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK.

Pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021, Tim Buletin Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah berkesempatan untuk berdiskusi mengenai Pengelolaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus dengan Bapak Putut Hari Satyaka, SE, MPP selaku Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK. Pria yang lahir di Kota Surakarta, 09 Juli 1973 ini memberikan banyak sekali wawasan mengenai penganggaran kegiatan DAK, dari mulai perencanaan hingga bertukar pikiran mengenai inovasi dalam pemantauan pengelolaan DAK oleh K/L Teknis. Alumni Australian National University ini mulai menjabat sebagai Direktur Dana Transfer Khusus pada tahun 2019 - hingga saat ini. Berikut adalah kutipan hasil orbrolan singkat dengan Bapak Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan.



Diskusi Tim PFID dengan Bapak Putut Hari Satyaka, S.E., MPP,

Bagaimana arah kebijakan Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Infrastruktur PUPR untuk saat ini dan kedepan

Kebijakan DAK harus selaras/*inline* dengan rencana kerja pemerintah setiap tahunnya dan harus sesuai dengan RPJMN. DAK Infrastruktur PUPR merupakan alokasi DAK terbesar ke 03 setelah pendidikan dan kesehatan, dan ini akan terus ditingkatkan karena kebutuhan infrastruktur di daerah sangat tinggi bahkan bisa mencapai Rp 5000 triliun untuk 5 tahun kedepan. DAK mempunyai arti penting bagi

daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik di daerah dan langsung menyentuh masyarakat sebagai penerima manfaat.

**Permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Infrastruktur PUPR?**

Permasalahan dan tantangan yang pertama ialah kualitas perencanaan. Pengalokasian DAK ini berbasis usulan dari pemerintah daerah. Terkadang usulan tersebut tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan banyak sekali usulan yang belum dikoneksikan dengan DAK yang lain. Contohnya

pada DAK kesehatan, pemerintah daerah ingin membuat Puskesmas tetapi belum ada akses jalan ke sana. Selain itu permasalahan di pusat juga banyak, seperti K/L Teknis melakukan perencanaan berbasis data, namun data yang bersumber dari daerah terkadang input nya kurang baik dan kurang meyakinkan validitasnya.

Kemudian yang kedua ialah Pelaksanaan DAK. Proses lelang memang tidak mudah dan sering terjadi gagal lelang dikarenakan melebihi batas waktu lelang dan akhirnya dana menjadi hangus.

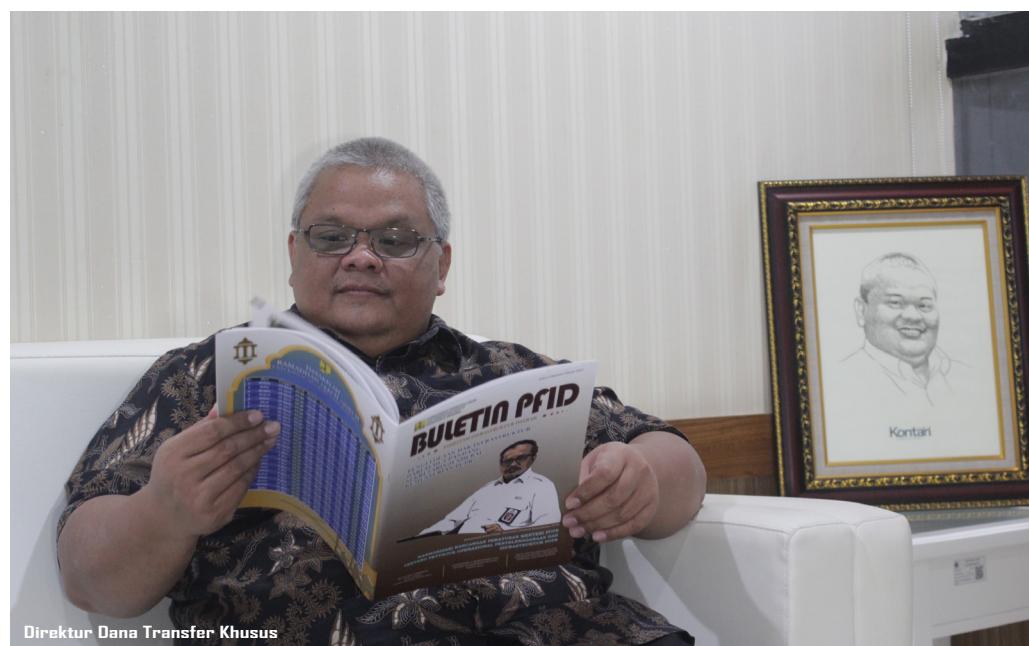
Selain itu juga sering terjadi permasalahan daerah terkait hukum.

Permasalahan yang ketiga ialah Monitoring DAK. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang berbasis pada output dan outcome dan dapat disinergikan dengan sasaran RPJMN.

Menurut saya, strategi yang tepat adalah Kementerian Keuangan bersama dengan Bappenas, K/L teknis terkait, Ditjen Perbendaharaan dan BPKP saling bersinergi untuk terus menyempurkan komunikasi satu sama lain, agar permasalahan dari mulai perencanaan hingga pemantauan dapat teratasi dengan baik dan optimal.

**Adakah rencana skema pendanaan selain DAK yang digunakan untuk pembangunan Infrastruktur Fisik di daerah?**

Saat ini, pemerintah daerah banyak bergantung pada DAK, padahal DAK bersifat bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan khusus, dan tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Oleh karena itu Lokasi Prioritas menjadi penting dalam penyusunan Rencana Kegiatan (RK) DAK. Untuk saat ini, kami



Direktur Dana Transfer Khusus

sedang mengembangkan hibah baik bersumber dari luar negeri ataupun pendanaan APBN rupiah murni namun nilainya tidak terlalu besar. Hibah ini memiliki sistem pre-financing, konsepnya adalah daerah melakukan pendanaan terlebih dahulu dari APBD, lalu dilakukan verifikasi teknis dan apabila layak akan di reimburst. Hal ini memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak terkait, karena pemerintah daerah harus menganggarkan dari APBD lalu mengembangkan creative financing atau melakukan pinjaman daerah.

Sebagai contoh mulai tahun 2020 hingga 2021, terdapat pinjaman Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) untuk infrastruktur. Pinjaman ini tergantung dari keberanian dan keseriusan daerah serta disiplin daerah dalam memanfaatkan pinjaman ini karena bunga relatif rendah. Selain itu ada juga sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU bukan hal yang mudah, namun dengan KPBU daerah bisa memanfaatkan dana swasta yang dapat dikombinasikan dengan APBD. Kembali lagi kita sedang berkoordinasi dengan K/L teknis lain agar segala jenis pendanaan ini bisa bersinergi dalam membangun infrastruktur daerah.

Kementerian PUPR mempunyai aplikasi e-Monitoring DAK, namun Pemerintah Daerah belum tertiib untuk mengisi laporan penyerapan DAK. Apakah kedepannya dapat terbuka kemungkinan untuk melakukan sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR terkait sharing data penggunaan DAK melalui aplikasi e-Monitoring DAK dan OMSPAN ?





Salah satu ruas jalan di Kab. Pesisir Selatan



Pekerja di salah satu ruas jalan kabupaten Pesisir Selatan

OMSPAN adalah aplikasi monitoring penyaluran dan penyerapan pelaksanaan DAK di daerah yang berfokus pada finansialnya sehingga diharapkan menjadi salah satu alat monitor pelaksanaan DAK didaerah, dan saat ini terbukti efektif. Selain itu, OMSpan juga merupakan alat untuk penyaluran, dan apabila akan disinergikan dengan aplikasi lain maka harus dicek terlebih dahulu karena aplikasi OMSpan digunakan untuk seluruh belanja nasional dan jangan sampai terganggu dengan fokus-fokus lainnya. Akan tetapi, kami saat ini sedang mengembangkan aplikasi Antara yang nantinya akan disinergikan dengan aplikasi pemantauan masing-masing K/L. Aplikasi ini akan menjadi perantara atau penghubung dari OMSpan dengan aplikasi pemantauan masing-masing K/L seperti e-Monitoring DAK yang dimiliki oleh Kementerian PUPR.

Terkait Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Kementerian Keuangan mengambil tindakan untuk Refocusing Alokasi DAK Fisik Infrastruktur. Selanjutnya di tahun 2021 sesuai SE-2/PK/2021 mengatur bahwa pelaksanaan DAK

Fisik 2021 mengutamakan padat karya dan menggunakan bahan baku lokal. Apakah kebijakan tersebut akan tetap dilanjutkan atau akan ada kebijakan lain untuk DAK Fisik tahun berikutnya?

Tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa. Saya masih ingat pada tanggal 27 Maret 2020 kita menghentikan seluruh proses pengadaan untuk DAK fisik diluar pendidikan dan kesehatan karena Covid dan dilanjutkan lagi dengan DAK Cadangan. Namun kita tetap fokus untuk melakukan padat karya dan memanfaatkan tenaga kerja lokal yang maksimal. Hal ini didasari oleh banyaknya orang yang di PHK dan tidak bisa survive lagi. Oleh karena itu didoronglah pembangunan infrastruktur secara padat karya agar masyarakat yang terkena PHK dapat bekerja lagi ditengah pandemi ini. Dan ditahun ini, kondisi belum sepenuhnya pulih dan kita masih terus mendorong agar difokuskan untuk tenaga kerja lokal atau padat karya.

Efektif? Kita harus memperhatikan secara lebih komprehensif tidak hanya dari segi DAK fisik, ada BLT Desa, PKH dan berbagai macam bantuan dari pemerintahan pusat yang diharapkan dapat

mengangkat daya beli masyarakat. Meskipun nilai pengangguran bertambah, tapi tidak seekstrim yang kita bayangkan, begitu juga dengan tingkat kemiskinan. Saat ini, ekonomi sudah mulai menggeliat naik lagi, buah dari kerja keras bukan hanya DAK tapi APBN secara keseluruhan melalui berbagai tools untuk membantu masyarakat untuk bergerak lagi. Namun, semakin banyak aktifitas perekonomian di masyarakat, juga berbanding lurus dengan meningkatnya kasus Covid-19 di masyarakat sehingga penyeimbangnya adalah melalui vaksin yang digalakkan oleh pemerintah. Kita terus melihat perkembangan saat ini, kita akan selalu memantau setiap minggu perkembangan covid dan perekonomian di masyarakat untuk menentukan kebijakan kedepan.

Seperti kita ketahui tahapan pengelolaan DAK meliputi perencanaan, pemrograman, dan pelaporan agar mewujudkan pengelolaan DAK Fisik yang tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran. Adakah inovasi dalam penetapan, penyaluran dan pengukuran capaian Kinerja DAK ?



Awal mula penetapan Alokasi DAK berbasis proposal di tahun 2016, karena sebenarnya DAK dialokasikan berdasarkan formula yang berisi kriteria umum, khusus dan teknis, namun yang terjadi adalah alokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan daerah. Lalu kita berinovasi dengan mengubah penetapan alokasi DAK berbasis usulan, agar kebutuhan daerah lebih tepat dengan alokasinya. Kita lebih banyak memperbaiki usulan alokasi DAK di Tahun Anggaran 2021 dengan mengedepankan DAK Penugasan pada lokasi prioritas.

Selain itu, inovasi alokasi disinergikan dengan kinerja pengelolaan DAK di daerah. Agar daerah lebih termotivasi dalam pengelolaan DAK, pemerintah pusat memberikan kebijakan apabila pengelolaan DAK dilakukan dengan baik oleh OPD, akan mendapat insentif tertentu. Sudah 1 tahun berjalan, didalam komponen DAK pada akhir penilaian ada 5% tambahan atau pengurangan berdasarkan kinerjanya. Kinerja diukur berdasarkan proses penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya. Karena, kita

tidak akan memberikan alokasi DAK yang tinggi untuk daerah yang tidak pernah bisa mencapai outputnya. Bagi daerah yang output dan penyerapannya selalu tercapai dengan baik, maka akan diberikan reward .

Sinkronisasi dan harmonisasi adalah suatu proses yang terus kita kembangkan dan membutuhkan perbaikan kualitas, dimana daerah harus memetakan kebutuhan yang selaras dengan sumber pendanaan yang lainnya. Kita sedang koordinasi dengan Direktorat jenderal Anggaran (DJA) supaya tidak tumpang tindih antara sumber pendanaan APBN dengan DAK. Jangan sampai membuat dermaga dari APBN dan tidak jauh ada dermaga juga dari DAK.

Bagaimana langkah-langkah percepatan dalam proses penyaluran DAK kepada Pemda? kita ketahui bersama, selama ini kinerja penyerapan keuangan rendah sehingga menghambat sasaran dan target prioritas nasional ?

Untuk ke 5 bidang dibawah naungan Kementerian PUPR sudah relatif baik dalam kinerja penyerapannya karena sudah

diatas 90 % namun, dibawah rata-rata yaitu 93% dari penyaluran. Kuncinya ada di pemerintah daerah, bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Meningkatkan kinerja SDM pemerintah daerah dapat dilakukan dengan bimtek dan program magang, baik teknis, keuangan dan pengawasannya.

**Apa pendapat dan harapan bapak terhadap kinerja Kementerian PUPR dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Infrastruktur PUPR?**

Kerjasama Dana Transfer Khusus dengan PFID sudah sangat baik, selain itu pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR mulai dari perencanaan, penetapan hingga penyerapan juga sudah sangat baik, namun tentu masih ada ruang untuk peningkatan maupun inovasi. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan lebih agresif dalam meningkatkan kualitas SDM dilapangan, perbaikan data perencanaan penganggaran alokasi DAK Fisik PUPR, serta monitoring dan evaluasi terkait output dan immediate outcome serta outcome sebagai dasar perencanaan alokasi DAK yang lebih baik \*

# VERIFIKASI DATA TEKNIS DAN USULAN RENCANA KEGIATAN DAK BIDANG IRIGASI TA 2022

Oleh : Nova Dorma Sirait, Indah Indriasputra,  
dan Rizky Ananda



Pembukaan verifikasi data teknis dan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi

**P**embangunan infrastruktur merupakan salah satu dari 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan Pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah per ekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memeratakan pembangunan.



Verifikasi online verifikator 2

Sesuai dengan Rancangan Tema RKP tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, dimana pembangunan infrastruktur masuk dalam jenis DAK fisik dengan arah kebijakan TA 2022 yaitu: Mempertajam fokus kegiatan DAK yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pan-

demi Covid-19; Meningkatkan permerataan layanan dan infrastruktur daerah; Mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM, food estate dan sentra produksi pangan, dan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif); Refokusung menu pada kegiatan yang bermi-



Verifikasi offline dengan pemerintah daerah



Verifikasi online verifikator 1

lai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah; Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional; serta Memperkuat integrase pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya.

Tahun Anggaran 2022 DAK Bidang Irigasi bersama dengan DAK Bidang Pertanian, Kehutanan, Kalautan dan Perikanan, Jalan,

Lingkungan Hidup dan Perdagangan masuk dalam DAK Fisik Peningkatan - Tematik Pengembangan 5 Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan, yang kebijakannya mendukung Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan, dengan kriteria Lokasi Prioritas merupakan Lokasi Pelaksanaan Mayor Project Food Estate dan Mayor Project Korporasi Petani; serta Daerah Pendukung Lokasi Pelaksanaan Mayor Project Food Estate.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2022 diawali dengan melakukan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan, dimana data teknis yang disampaikan harus sesuai/inline dengan usulan rencana kegiatan yang akan diusulkan. Verifikasi data teknis ini dilakukan agar pendaftaran mengetahui dengan jelas permasalahan dan aset pada daerah irigasi kewenangannya sehingga penanganan yang akan dilakukan tepat sasaran. Dengan demikian, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah melalui Bidang Pelaksanaan DAK SDA melakukan kegiatan Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2022 yang dilaksanakan sebanyak 3 Gelombang, kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dan online. Tujuan diselenggarakannya Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA. 2022 ini adalah untuk melakukan pembahasan dan mengidentifikasi terkait data teknis dan usulan rencana kegiatan DAK Irigasi TA 2022, selain itu untuk



Verifikasi offline menu pembangunan jaringan irigasi

memeriksa kesiapan dokumen persyaratan dalam pengusulan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA. 2022.

Kegiatan Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2022 gelombang pertama mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Balai Besar/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) se-Pulau Sumatera pada 22 Maret - 25 Maret 2021 dengan total Pemda yang diundang sebanyak 146 Pemda dan 10 BBWS/BWS. Dari total 146 Pemda yang diundang, terdapat 117 Pemda yang dapat hadir untuk mengikuti rangkaian acara verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan DAK Bidang Irigasi baik secara tatap muka maupun secara daring. Serta, terdapat 105 Pemda yang sudah menyelesaikan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan DAK Bidang Irigasi dan 12 Pemda yang terkonfirmasi tidak mengusulkan DAK Bidang Irigasi TA. 2022.

Sedangkan Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2022 gelombang kedua mengundang Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BBWS/BWS se-Pulau Jawa dan Kalimantan pada 29 Maret - 01 April 2021, dengan total Pemda yang diundang sebanyak 165 Pemda dan 13 BBWS/BWS. Dari total 165 Pemda yang diundang tersebut, terdapat 132 Pemda yang dapat hadir serta terdapat 111 Pemda yang sudah menyelesaikan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2022 sampai dengan penandatanganan URK. Selain itu juga, terdapat 25 Pemda yang terkonfirmasi tidak mengusulkan DAK Bidang Irigasi TA 2022.

Pelaksanaan Verifikasi Data Teknis dan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi gelombang ketiga mengundang Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan BBWS/BWS se-Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan jumlah Pemda yang

diundang sebanyak 171 Pemda dan 12 BBWS/BWS. Dari keseluruhan Pemda yang diundang, hanya 114 Pemda yang dapat hadir melaksanakan verifikasi data teknis dan usulan rencana kegiatan baik secara tatap muka maupun secara daring. Terdapat hanya 103 Pemda yang mampu menyelesaikan pembahasan sampai dengan penandatanganan URK oleh Kabid Pelaksanaan DAK SDA, PFID dan Kasubdit Perencanaan Teknis Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA. Sedangkan untuk Pemda yang terkonfirmasi tidak mengusulkan DAK Bidang Irigasi TA 2022 adalah sebanyak 33 Pemda. Hasil dari penilaian verifikasi ini merupakan dasar untuk Pemda melukai penginputan pengusulan dalam aplikasi KRISNA \*



## BANTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAK BIDANG IRIGASI TAHUN 2021 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh : Nova Dorma Sirait, Irma Rahmawati,  
dan Ganang Saputro

**D**ana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Alokasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Tujuan dari DAK sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, ialah untuk membantu Daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Pada penerapan DAK Fisik Penugasan Tahun 2022, penyelenggaran DAK Bidang Irigasi tergabung dalam Program Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan bersama dengan Bidang Pertanian; Bidang Perikanan dan Kelautan; Bidang

Kehutanan; Bidang Jalan; Bidang Perdagangan; serta Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan, kebijakan DAK Bidang Irigasi Tahun 2022 terdiri dari:

1. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan pemulihhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dalam pengembangan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan.

Pada proses perencanaan DAK Bidang Irigasi Tahun 2022, berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan ter-

kait Kriteria Lokasi Prioritas. Khusus untuk Bidang Irigasi, terdapat beberapa Kriteria Lokasi Prioritas, antara lain:

1. Menu Pembangunan Jaringan Irigasi:
  - Pemda yang memiliki kegiatan Pembangunan Baru yang sedang berjalan (on going).
  - Pemda dengan produktivitas padi lebih besar dari produktivitas nasional dan dapat memenuhi 8 Syarat Teknis Pembangunan Irigasi Baru.
2. Menu Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi:
  - Memiliki D.I kewenangan sesuai Permen PUPR 14/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi.
3. Menu Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir:
  - Memiliki wilayah sungai kewenangan berdasarkan Permen PUPR 4/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.



Pelaksanaan bimbingan teknis di BBWS Sumaera VII Palembang

Pada Tahun 2022 untuk daerah Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa daerah yang masuk dalam Lokasi Prioritas Bidang Irigasi, yaitu Prov Sumatera Selatan, Kab Banyuasin, Kab Empat Lawang, Kab Lahat, Kab Muara Enim, Kab Musi Banyuasin, Kab Musi Rawas, Kab Ogan Ilir, Kab Ogan Komering Ilir, Kab Ogan Komering Ulu Timur, dan Kota Pagar Alam. Selain itu pada tahun 2021, terdapat 3 Pemda di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapat Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2021, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Kab Banyuasin, dan Kab Musi Banyuasin.

Dalam rangka menindaklanjuti kegiatan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2021, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII menyelenggarakan Acara Monitoring dan Evaluasi Terkait Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA 2020-2021 di Daerah Irigasi dan Rawa Kewenangan Provinsi dan Kabupaten Seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Acara tersebut dilaksanakan secara daring dan luring, dimulai dari tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan 10 Juni 2021 dengan mengundang 3 Pemda penerima Bantuan Teknis di Provinsi Sumatera Selatan secara luring dan 12 Pemda lainnya di Provinsi Sumatera Selatan secara daring. Untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi di-

laksanakan pada hari kedua tanggal 10 Juni 2021.

Pelaksanaan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2021 memiliki maksud untuk memberikan bantuan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi DAK untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan irigasi kepada Pemda penerima DAK Bidang Irigasi. Selain itu, tujuan dilaksanakan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2021 antara lain memberikan bantuan teknis kepada Pemda sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi secara optimal, membantu menyelesaikan masalah/kaidah teknik/engineering pada saat penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi, dan memberikan laporan data dan informasi penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi di Pemda secara berkala kepada PFID.

Pelaksanaan Bantuan Teknis Penyelenggaraan DAK Bidang Irigasi TA 2021, diharapkan menjadi faktor pendukung Pemda dalam mempersiapkan proses Pengusulan DAK Bidang Irigasi Tahun 2022. Pada proses Pengusulan DAK Bidang Irigasi Tahun 2022, terdapat beberapa persyaratan, meliputi:

#### 1. Persyaratan Umum:

- Data Teknis Irigasi harus terverifikasi oleh BBWS/BWS, Dinas Provinsi dan Pusat



dalam Aplikasi e-Monitoring, sebagai persyaratan melaksanakan verifikasi URK.

- Usulan Rencana Kegiatan harus terverifikasi oleh BBWS/BWS, Dinas Provinsi dan Pusat dalam Aplikasi e-Monitoring, sebagai dasar penilaian usulan dalam KRISNA DAK.
- URK harus sesuai/inline dengan data teknis.

#### 2. Persyaratan Khusus Irigasi:

- Sudah melaksanakan e-PAK-SI.
- Usulan yang tidak dilengkapi dengan dokumen perencanaan (Laporan SID/DED, Gambar, Skema, RAB, dan Backup Volume) tidak dapat disetujui.
- Sesuai dengan kebijakan DAK 2021, nilai usulan minimal Rp 500 Juta, dan luas outcome minimal 30 Ha.
- Usulan kegiatan DAK merupakan penyelesaian permasalahan satu sistem irigasi.

#### 3. Persyaratan Khusus Pengurangan Resiko Banjir:

- Kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang diusulkan berada pada wilayah sungai kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Permen PUPR No. 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

- Dilakukan untuk melindungi daerah irigasi khususnya daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah dari resiko banjir dengan frekuensi lebih dari 2 kali dalam 5 tahun terakhir.
- Memiliki peta genangan banjir.
- Memiliki dokumen teknis (Rencana Induk Pengendalian Banjir/SID/DED) dan dokumen pendukung yang lengkap.
- Memiliki surat keterangan dampak bencana dari BPBD serta mendapat verifikasi dari BBWS/ BWS setempat.

Di awal acara, terlebih dahulu dijelaskan Pelaporan Pemda di e-Monitoring DAK PUPR dan OM-SPAN Kemenkeu. Pelaporan di e-Monitoring DAK PUPR, rata-rata pelaporan seluruh Pemda untuk progres fisik sebesar 10,13% dan untuk progres keuangan sebesar 18,87%. Pada pelaporan di OM-SPAN Kemenkeu, rata-rata penyaluran per provinsi sebesar 52,2%. Dari seluruh Pemda di Provinsi Sumatera Selatan, Pemda yang telah tersalur OM-SPAN namun belum input progres di e-Monitoring adalah Kab Musi Banyuasin dan Kab Ogan Komering Ilir. Seluruh Pemda diharap segera mempercepat lelang dan kontrak DAK 2021 sebelum 21 Juli 2021, dan melaporkan dalam e-Monitoring DAK PUPR.

Pada acara ini juga dibahas terkait permasalahan terkait Pelaporan Data Teknis, dimana terdapat 84 dari 319 Pemda (26%) Pemda yang termasuk dalam Lokpri DAK 2022, belum mengirimkan Data Teknis DAK 2022 dalam eMonitoring dan terdapat 61 dari 84 Pemda yang belum menyampaikan Data Teknis, masuk dalam Lokpri DAK 2022, dan menyampaikan URK dalam eMonitoring. Selain

dalam hal pelaporan, ada beberapa permasalahan terkait pengisian data teknis, antara lain:

1. Form 1(Data Prasarana Fisik dan Dokumentasi)
  - Data luas areal (Ha) tidak diisi lengkap
  - Data bangunan dan dokumentasi tidak diisi lengkap
  - Ada beberapa DI yang data-nya tidak diisi
2. Form 2 (Data Realisasi Tanam dan Produktivitas)
  - Kesalahan dalam penjumlahan MT
  - Kesalahan perhitungan IP
  - Kesalahan dalam perhitungan produktivitas
3. Form 3 (Data Organisasi O & P)
  - Data organisasi personalia O & P tidak diisi lengkap
  - Data kebutuhan dan keku-rangan personil O & P tidak diisi
  - Data sarana penunjang O & P tidak diisi
4. Form 4 (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)
  - Kurang lengkap pengisian data
  - Pengisian IKSI melebihi batas penilaian maksimal (kesalahan perhitungan)
  - Pengisian kondisi jaringan irigasi tidak sesuai dengan peraturan
  - Pengisian areal terdampak kondisi jaringan irigasi melebihi/kurang dari luas areal ataupun tidak diisi
5. Form 5 (Sharing APBD TA 2021)
  - Data alokasi APBD tidak diisi lengkap/kosong
  - Ada yang mengisi menggunakan data tahun 2020
6. Form 6 (Kelembagaan Irigasi)
  - Data kelembagaan irigasi ti-dak diisi lengkap/kosong
7. Form 7 (Data P3A/GP3A/IP3A)
  - Data P3A/GP3A/IP3A tidak diisi lengkap/kosong

8. Form 8 (Pelaksanaan e-PAKSI)
  - Data pelaksanaan e-PAKSI tidak diisi lengkap/kosong
9. Form 9 (Rekapitulasi Kondisi)
  - Data rekapitulasi kondisi tidak sinkron dengan data form 4
  - Adanya kesalahan dalam perhitungan
  - Ada beberapa angka/formula yang error

Selain pembahasan terkait Pelaporan Data Teknis, Pelaporan Dana O & P dalam Data Teknis juga menjadi pembahasan utama dalam acara ini. Sharing APBD dalam pendanaan O & P Jaringan Irigasi merupakan komponen penting dalam Data Teknis DAK dan mencerminkan komitmen Pemda dalam pengelolaan Irigasi. Terkait Pelaporan Dana O & P, Baru 158 (49%) dari 312 Pemda Lokpri DAK 2022 yang menyampaikan Data APBD pendanaan O & P sesuai dengan format yang ditentukan. Pemda perlu segera memperbaiki format pelaporan Dana OP dalam Data Teknis sesuai dengan format yang ditentukan.

Terkait beberapa hal tentang Proses Pengusulan DAK Bidang Irigasi Tahun 2022 di atas, Pemda harus benar-benar mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Pada agenda selanjutnya, seluruh Pemda Pengusul DAK Bidang Irigasi Tahun 2022 harus mempersiapkan diri untuk mengikuti Verifikasi Perbaikan Data Teknis dan URK pada tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2021. Pada proses verifikasi perbaikan nanti, akan dilaksanakan pengecekan hasil perbaikan Data Teknis dan URK. Dimana setelah melalui tahapan tersebut, dokumen-dokumen yang masih salah, dapat diperbaiki dan dipersiapkan waktu pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi pada pertengahan bulan Juli 2021 \*



## PEMBINAAN DAN PEMBAHASAN USULAN DAK PADA KEGIATAN VERIFIKASI USULAN DAK BIDANG JALAN TA. 2022

Oleh : Brigitta Yolanda P. P.

**B**erdasarkan timeline perencanaan kegiatan DAK TA. 2022, pemerintah daerah sudah dapat melakukan pengusulan ke dalam aplikasi KRISNA sejak tanggal 21 Mei 2021. Dalam mengajukan usulan pemerintah daerah harus memperhatikan kriteria yang sesuai untuk menghindari reject pada kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK. Dalam upaya pembinaan kepada SKPD, maka Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan mengadakan kegiatan Verifikasi Usulan DAK Bidang Jalan TA. 2022 agar usulan yang mereka input dalam aplikasi KRISNA dapat lebih terarah dan sesuai dengan data teknis yang SKPD miliki. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2

gelombang yaitu pada tanggal 14-15 Juni 2021 di Jakarta dan 17-18 Juni 2021 di Tangerang.

Kegiatan Verifikasi Usulan DAK Bidang Jalan TA. 2022 ini terdiri dari dua sesi yaitu pemaparan dari beberapa narasumber dan yang kedua adalah desk antara SKPD dengan para verifikator 1 di Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan. Narasumber yang diundang pada acara ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas. Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan, PFID juga memberikan materi terkait pelaksanaan DAK Bidang Jalan. Selain itu turut mengundang juga daerah-daerah yang memiliki inovasi dalam bidang

penyelenggaraan jalan dan jembatan. Terdapat lima daerah yang memiliki inovasi yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah peserta sebanyak 120 daerah untuk dua gelombang, dimana daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang sudah menyelesaikan verifikasi data teknis jalan daerah tahun 2021. Kegiatan ini mengundang Dinas pengampu DAK Bidang Jalan dan juga Bappeda agar tercipta koordinasi yang baik dalam melakukan pengusulan, terutama dalam menentukan prioritas kegiatan penyelenggaraan jalan daerah.

Bapak Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Riono



Suprapto, menyampaikan kebijakan-kebijakan DAK Bidang Jalan TA. 2022 pada pembukaan kegiatan ini, yaitu

- Mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19;
- Meningkatkan pemerataan laluan dan infrastruktur dasar di daerah;
- Mendukung pencapaian prioritas nasional melalui kebijakan DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM; Food Estate dan Sentra Produksi Pangan; dan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif);
- Refocusing menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah;

- Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional;
- Memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya

Beliau juga menyampaikan harapan agar dengan terselenggaranya kegiatan ini pemerintah daerah dapat mengurangi kesalahan dalam memasukkan data ke KRISNA seperti kesalahan memasukkan menu dan volume, dengan kata lain pemerintah daerah mengusulkan kegiatan yang sudah sesuai dengan data teknis jalan daerah yang sudah terverifikasi.

Kementerian Keuangan sebagai narasumber pertama, disampaikan oleh Bapak Jaka Sucipta dan Bapak Utomo, memberikan berbagai informasi mengenai DAK Fisik yang sudah dilaksanakan selama ini. Mulai dari

evaluasi dan tantangan, realisasi, dan pola penyaluran DAK Fisik Nasional. Diinformasikan bahwa sejak tahun 2018 - 2021 DAK Fisik Bidang Jalan telah mendapatkan pagu alokasi sebesar Rp 49,6 Triliun atau sekitar 20% dari total pagu DAK Fisik 2018-2021. Tingkat penyaluran DAK Fisik bidang Jalan hampir selalu lebih baik dibandingkan bidang-bidang DAK Fisik lainnya kecuali pada tahun 2020, dikarenakan adanya refocusing terkait dengan pandemi Covid-19. Secara total pada periode 2018-2021 telah disalurkan Rp 38,1 Triliun untuk DAK Fisik bidang Jalan. Tanpa memperhitungkan proses penyaluran TA 2021, masih terdapat Rp2,41 Triliun pagu yang gagal tersalurkan (setara dengan kegiatan pemeliharaan berkala jalan kab/kota sepanjang 804 km dengan unit cost Rp3M/Km). Hal yang menarik bagi pemerintah daerah adalah mengenai batas waktu pe-



Sesi Desk Verifikasi Usulan DAK Bidang Jalan TA. 2022

nyaluran DAK Fisik. Beberapa pemerintah daerah ada yang mengajukan pertanyaan terkait batas waktu penarikan dan penyaluran DAK Fisik. Pertanyaan pun langsung ditanggapi oleh narasumber dan menjadi informasi tambahan yang berguna bagi peserta agar tidak terjadi kesalahan dalam penyerahan dokumen-dokumen untuk penarikan dana.

Selanjutnya adalah penyampaian materi dari Kementerian PPN/Bappenas yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Zainuddin selaku koordinator Bidang Jalan dari Direktorat Transportasi Bappenas. Materi yang disampaikan lebih memfokuskan kepada penjelasan Proyek Prioritas Strategis yang mengarahkan kepada penjaminan Kebijakan DAK TA. 2022. Proyek prioritas strategis ini yang mempengaruhi dalam pemilihan daerah lokasi prioritas DAK Fisik Penugasan, difokuskan pada daerah-daerah yang mendukung tematik DAK Fisik Penugasan. Terdapat tiga tematik untuk DAK

Penugasan TA. 2022 yaitu:

1. Penguatan DPP dan Sentra Industri Kecil Menengah
2. Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan
3. Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.

Kementerian PPN/Bappenas selama ini membantu dalam memberikan daftar lokasi prioritas untuk DAK Fisik Bidang Jalan, sehingga pada kegiatan ini juga terdapat desk dengan petugas yang berbasar dari kementerian tersebut. Terdapat beberapa pertanyaan dari pemerintah mengapa daerah mereka tidak mendapatkan slot dalam DAK Fisik Penugasan. Dalam penentuan lokasinya, Bappenas menggunakan sistem pendekatan koridor bagi masing-masing tematik. Contohnya untuk tematik

2, Bappenas akan mencari akses yang langsung menuju lokpri Kawasan pertanian perikanan dan kemudian akan mencari juga akses yang menghubungkan lokpri dengan Pusat Pemasaran. Sehingga penetuan lokasi prioritas ini sudah ada dasar dan pemetaan yang jelas dan diharapkan dapat memberikan output dan outcome yang maksimal dari DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2022. Bappenas telah menentukan ruas-ruas jalan yang sebaiknya diusulkan dan dimasukkan dalam aplikasi KRISNA oleh pemerintah daerah. Saran-saran ini sebaiknya dipertimbangkan oleh pemerintah daerah untuk dapat dikerjakan agar sesuai dengan masing-masing tematik yang pemerintah daerah dapatkan.

Materi dari Kementerian Dalam Negeri dibawakan oleh Bapak Simon Saimima selaku Kasubdit Fasilitasi DAK. Topik yang menjadi



perhatian bagi pemerintah daerah adalah mengenai aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang masih baru digunakan untuk tahun 2021 ini. SIPD tersebut berfungsi dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. DPA sendiri cukup penting peranannya dalam kegiatan Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah karena SKPD diminta untuk menganalisa persentase kegiatan kebinamargaan setiap tahunnya dari seluruh pagu anggaran daerah mereka. SKPD banyak yang masih belum terbiasa dalam penyusunan DPA yang baru ini, terutama dalam penginputan menu-menu sub-kegiatan yang harus diselaraskan dengan menu penyelenggaran jalan dan jembatan. Namun diharapkan seiring dengan berjalannya waktu, SKPD akan semakin familiar dengan SIPD dan dapat meng-input kegiatan yang sesuai dengan rencana pekerjaan masing-masing pemerintah daerah.

Paparan oleh Bapak Dedy Gunawan selaku Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan, PFID memfokuskan pada keterkaitan antara alokasi DAK Fisik Jalan dengan kemantapan jalan daerah. Hingga tahun 2020 masih terjadi backlog untuk kemantapan jalan, yaitu 6,05% untuk provinsi dan 7,87% untuk kabupaten/kota. Hal ini menjadi perhatian karena dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan selama ini masih banyak ditemukan evaluasi yaitu perlunya prioritas dalam pemrograman dan penganggaran jalan daerah sehingga akan tercapai kemantapan jalan daerah sesuai dengan target RPJMN 2020 - 2024. Pemerintah daerah juga diingatkan untuk tidak melulu fokus dengan anggaran dari DAK atau hibah, tetapi diharapkan memberikan anggaran lebih dari APBD untuk mengejar kemantapan jalan.

Sesi yang tidak kalah menarik

adalah paparan inovasi dari lima daerah. Beberapa inovasi yang dikenalkan terkait dengan kegiatan di lapangan adalah penggunaan aspal karet dari Musi Banyuasin dan aspal plastik dari Kabupaten Banyumas. Kemudian Kabupaten Gresik mengenalkan mengenai Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Pemeliharaan Jalan yang berupa aplikasi APALAN dan MY BINAMARGA. Kabupaten Siak dari Provinsi Riau sendiri memiliki sistem yang membantu yaitu penanganan jalan mempertahankan layanan kondisi mantap dengan membentuk URC pemeliharaan jalan serta pelaksanaan CSR dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta. Begitu pula dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang memiliki program CSR dengan perusahaan swasta agar tercipta koordinasi baik dengan pemerintah daerah sebagai pemilik jalan dengan pengguna jalan. Paparan inovasi ini diharapkan dapat diaplikasikan dan memacu kinerja lebih baik lagi bagi peserta lainnya.

Kegiatan Verifikasi Usulan DAK Bidang Jalan TA. 2022 ini dilanjutkan dengan sesi desk yang berlangsung selama dua hari dan berjalan dengan lancar. Para verifikator 1 Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan membahas dengan seksama dari usulan-usulan yang disampaikan oleh para SKPD. Namun dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah masih ada yang mengusulkan ruas-ruas yang belum sesuai dengan kondisi data teknisnya. Menu kegiatan DAK Bidang Jalan TA. 2022 ini masih sama seperti pada TA. 2021 yaitu sebagai berikut:

Dalam pembahasan pada sesi desk masih didapat SKPD yang mengusulkan kegiatan bagi ruas jalan yang masih dalam kondisi mantap. Masing-masing verifikator 1 kemudian mengarahkan kepa-

da SKPD untuk me-review ulang kondisi masing-masing ruas jalan mereka. Seperti kegiatan peningkatan jalan hanya dapat dilakukan untuk jalan dengan tipe permukaan kerikil dengan kondisi sedang sampai dengan rusak berat. Kemudian volume yang diusulkan juga perlu diperhatikan oleh SKPD, karena banyak SKPD yang mengusulkan kegiatan untuk sepanjang ruas. Padahal kondisi yang dapat dilakukan pekerjaan adalah yang dalam kondisi rusak. Jika sudah terjadi pemahaman dari SKPD maka dipastikan usulan tersebut akan tertuang pada BA Bappeda dan dimasukkan ke dalam aplikasi KRISNA. Tidak lupa seluruh usulan tersebut sudah harus memiliki perencanaan yang jelas, dengan bukti sudah memiliki kontrak perencanaan pihak ketiga.

Secara keseluruhan kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan SKPD juga semakin terarah dalam memberikan usulan untuk DAK TA. 2022 ini. Kegiatan ini dilaksanakan seluruhnya secara tatap muka dan dengan menjalankan protokol Kesehatan secara ketat. Peserta yang masuk ke dalam kegiatan ini adalah mereka yang dapat menunjukkan hasil swab PCR/Antigen negatif. Semoga dengan adanya kegiatan ini, baik dari sesi pemaparan materi yang sangat informatif dari masing-masing K/L maupun dengan sesi desk, SKPD dapat semakin memahami prosedur yang sangat melekat dalam kegiatan perencanaan dan pemrograman DAK Bidang Jalan dan Jembatan. Sehingga akan tercipta penyelenggaraan jalan daerah yang lebih baik lagi serta target kemantapan jalan daerah akan tercapai \*

## INFOGRAFIS 2 TAHUN PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH MENYELENGGARAKAN DAK FISIK INFRASTRUKTUR PUPR



**DAK FISIK II RUMAH KH**



Program untuk  
hatan,  
khusus  
dan Pr

**2019**

**2020**

### DAK FISIK INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah melalui bidang jalan dan jembatan telah melaksanakan rehabilitasi, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan selama tahun 2019-2020 dengan besaran sebagai berikut :



**451,35 Km** Rehabilitasi  
**3.162,76 Km** Pembangunan  
**6.366,24 Km** Peningkatan



**35,20 Km** Rehabilitasi  
**824,50 Km** Peningkatan

**TOTAL** **10.840, 05 Km**



### DAK FISIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Menu Program Pelaksanaan DAK SDA Pada Tahun 2019-2020 terdiri dari Peningkatan, Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa dengan capain peningkatan/pembangunan/rehabilitasi Bendung sebagai berikut:



**139 Kegiatan**  
Peningkatan  
Pembangunan

**562 Kegiatan**  
Rehabilitasi



**2 Kegiatan**  
Peningkatan  
Pembangunan

**305 Kegiatan**  
Rehabilitasi



**DAK FISIK INF**



Pening  
busi air  
dengan  
Perpip

**TOTAL**  
**1.008 Kegiatan**  
Peningkatan dan Rehabilitasi

## DAK FISIK INFRASTRUKTUR RUMAH SWADAYA

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah pada tahun 2019-2020 telah melaksanakan pembangunan baru rumah swadaya di daerah dengan jumlah

19  
20  
4.501 Unit  
7.591 Unit

**TOTAL**  
**12.092 Unit**

## INFRASTRUKTUR SANITASI

Pembangunan rumah layak huni ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, dan veteran di daerah tertinggal, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

391 Unit

347 Unit

**TOTAL**  
**738 Unit**

## INFRASTRUKTUR AIR MINUM

Kekurangan sistem distribusi air minum berkaitan dengan perluasan SPAM di daerah



**83.389 SR (2019)**  
**211.402 SR (2020)**

**TOTAL**  
**294.791 SR**

## DAK FISIK INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA DISTRIBUSI AIR MINUM



Selama tahun 2019-2020 telah dilaksanakan pembangunan, peningkatan sarana terbangun reservoir untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sarana distribusi Air Minum.



**99 Unit (2019)**

**16.370 m<sup>3</sup> (2020)**

Pada tahun 2020 hanya dilakukan peningkatan idle capacity pada reservoir terbangun.

## DAK FISIK INFRASTRUKTUR SISTEM SANITASI



Selama tahun 2019-2020 Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah telah melaksanakan pembangunan prasarana sanitasi daerah dengan jumlah 538,6 Unit Prasarana

**2019**

**4 Unit**

**2020**

**38 Unit**

**TOTAL**  
**42 Unit TPS 3R**

## DAK FISIK INFRASTRUKTUR IPAL KOMUNAL DAN MCK KOMUNAL

**2019**  
**6 Unit**

**2020**  
**296 Unit**



**TOTAL**  
**302 Unit IPAL Komunal**

**2019**  
**30 Unit**

**2020**  
**164 Unit**



**TOTAL**  
**194 Unit MCK Komunal**

Zoom Meeting  
Recording... Participants (17)

Find a participant

Agus Waluyo (Host, me)
PROVINSI SUMATERA UTARA
sari satria
Ahmad Izzuddin_Bangda
Akram PFID PUPR
Mulyanto ys_Kemenparekraf
Sinta PFID
Yusuf PFID
Akbar_Bangda
Azies Bangda
Bappenas_Cesar
Dedy Gunawan
Disbudpar Provsu_Bidang Destin...
Frandi S
RAMA DIFAYOGA LLJ
Taufik PFID
Dhany MRLL

Participants (17)

Tampilan Peserta Kegiatan Verifikasi PHJD dan PRIM

## VERIFIKASI PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD) DAN *PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE (PRIM)*

Oleh : Frandi Sahabat

**P**enyelenggaraan Verifikasi Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) Tahap I Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada bulan April yang diikuti oleh daerah penerima PHJD dan PRIM yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi

Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Malang, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sambas. Kegiatan tersebut diantaranya melalukan verifikasi terhadap administrasi serta data teknis pemerintah daerah.

Verifikasi untuk insentif institusi dilakukan atas pencapaian output Bappeda, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ), Dinas PU Provinsi / Kabupaten, Dinas Pariwisata, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB). Adapun hasil verifikasi diantaranya pencapaian output untuk insentif institusi serta nilai pencairan hibah seperti tertera pada Tabel Pertimbangan Penyaluran Daerah PHJD dan PRIM Tahap I TA.2021 sebagai berikut :

Tabel Daftar Pertimbangan Penyaluran Daerah PHJD dan PRIM Verifikasi Tahap I TA. 2021

Total Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) FASE I, II, III	Rp 96.733.050.000
Terbilang : Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah	
Total Program Province Road Improvement And Maintenance(PRIM)	Rp 2.122.966.400
Terbilang : Dua Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah	

Pembayaran/penyaluran hibah dilaksanakan didasarkan pada hasil keluaran yang terukur atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Verifikasi dilakukan untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria yang ditentukan sebagai dasar perhitungan nilai pencairan dana hibah. Verifikasi pekerjaan atas pelaksanaan program hibah tahun 2019-2021 untuk hibah ke provinsi dan kabupaten / kota. Verifikasi ini dilaksanakan secara independen dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerja-

aan. Verifikasi Pekerjaan PHJD dilakukan sebagai syarat untuk pencairan hibah yang dilakukan 3 (tiga) tahap dalam kurun waktu pelaksanaan program hibah tahun

kedua dengan alokasi dana hibah untuk konstruksi dan insentif institusi yang tercantum di dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD).

## SOSIALISASI PELAPORAN CAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BERBASIS APLIKASI

Oleh : Leviana Okvianty,  
Muhamad Aminudin Aziz



Pembukaan Sosialisasi Pelaporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal PUPR Berbasis Aplikasi  
Oleh Kepala Pusat FID dan Kabag Perkim PFID

**P**enerapan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (SPM PUPR) mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2019 dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu. Terkait hal tersebut berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan SPM dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada bulan ketiga setelah tahun anggaran berakhir. Dalam rangka mendu-



kung percepatan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah, diperlukan partisipasi dan dukungan program seluruh pemangku kepentingan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satunya adalah dengan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian PUPR sebagai salah satu kementerian teknis dalam penerapan SPM memiliki peran melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM secara teknis. Pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan SPM PUPR meliputi tahapan: pengumpulan data; penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; penyusunan rencana peme-



Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal PUPR

nuhan pelayanan dasar; dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Kementerian PUPR telah melaksanakan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sejak tahun 2019 dengan dilaksanakannya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan SPM PUPR.

Sebagaimana telah disampaikan, dalam upaya pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan penerapan SPM PUPR, Kementerian PUPR mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Capaian Air Minum, Air Limbah, Perumahan, dan Persampahan (SICALMERS). Aplikasi ini dibangun guna mengontrol sejauh mana pelaksanaan penerapan SPM PUPR oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan adanya aplikasi ini, maka Kementerian PUPR melaksanakan sosialisasi pelaporan capaian penerapan SPM PUPR berbasis aplikasi untuk memberi pemahaman kepada pemerintah daerah tentang peng-

gunaan aplikasi tersebut.

Tujuan pelaksanaan Sosialisasi Pelaporan Capaian Penerapan SPM PUPR Berbasis Aplikasi adalah memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai pelaporan capaian penerapan SPM PUPR berbasis aplikasi, penggunaan aplikasi SICALMERS, dan data yang perlu dimasukkan ke dalam aplikasi SICALMERS.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan acara Sosialisasi Pelaporan Capaian Penerapan SPM PUPR Berbasis Aplikasi secara daring melalui Zoom Meeting dan tatap muka terbatas yang dibagi kedalam 4 wilayah, yaitu:

1. Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku di Hotel Horison Ultima Bekasi pada 30-31 Maret 2021;
2. Wilayah Sulawesi dan Papua di Hotel Horison Bogor Icon pada 5-6 April 2021;

3. Wilayah Sumatera di Hotel Golden Tulip Essential Tangerang pada 8-9 April 2021;
4. Wilayah Jawa dan Kalimantan di Hotel Golden Tulip Essential Tangerang pada 15-16 April 2021.

Acara Sosialisasi Pelaporan Capaian Penerapan SPM PUPR Berbasis Aplikasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diawali dengan arahan dan pembukaan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR. Masing-masing narasumber diberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk memaparkan materinya. Setelah itu dilanjutkan sesi tanya jawab yang dilakukan kurang lebih 1 jam. Pada sesi siang dilaksanakan sesi pengenalan aplikasi SICALMERS dengan pembicara dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Setelah itu dilaksanakan



coaching clinic terkait penggunaan aplikasi SICALMERS kepada SKPD provinsi/kabupaten/kota yang hadir langsung maupun daring menggunakan aplikasi Zoom yang dilanjutkan hingga hari kedua. Peserta pada acara ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD pengampu air minum, sanitasi, dan perumahan dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa aplikasi SICALMERS disusun guna mengontrol sejauh mana pelaksanaan penerapan SPM PUPR oleh pemerintah daerah dari mulai pengumpulan data, perencanaan, perhitungan kebutuhan, hingga pelaksanaan. Dari pelaporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah akan diketahui capaian SPM dari pemerintah daerah tersebut. Adapun pengguna

aplikasi SICALMERS adalah Dinas Teknis Pengampu air minum, sanitasi, dan perumahan dari provinsi maupun kabupaten/kota; Bappeda provinsi maupun kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Dari pengguna tersebut memiliki lingkup kegiatan masing-masing yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Pengguna dan Lingkup Kegiatan Pada Aplikasi SICALMERS

Pengguna		Lingkup Kegiatan
Kabupaten/Kota	Dinas Teknis Pengampu	Air Minum
		Sanitasi
		Perumahan
	Bappeda	
Provinsi	Dinas Teknis Pengampu	Input dan edit data: 1. Data Dasar 2. Rencana Pemenuhan 3. Pelaksanaan Pemenuhan 4. Data Capaian
		Reviu dan verifikasi data yang diinput oleh OPD Teknis Kabupaten/Kota
		Air Minum
	Bappeda	
Pemerintah Pusat	Input dan edit data: 1. Data Dasar 2. Rencana Pemenuhan 3. Pelaksanaan Pemenuhan 4. Data Capaian	
	Reviu dan verifikasi data yang diinput oleh OPD Teknis Kabupaten/Kota dan Provinsi	
	Pemantauan dan Evaluasi	

Pada aplikasi SICALMERS terdapat alur pelaporan dan verifikasi yang memiliki tanggat waktu dan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Adapun alur pelaporan dan verifikasi pada aplikasi SICALMERS dapat dilihat pada gambar berikut :



Sampai dengan 25 Juni 2021, jumlah pengguna yang sudah mendaftar dan memiliki akun dalam aplikasi SICALMERS dapat dilihat pada tabel :

Tabel Pengguna yang Sudah Mendaftar dan Memiliki Akun pada Aplikasi SICALMERS

No	Pengguna	Jumlah Pemerintah Daerah		
		Total	Sudah Memiliki Akun	Belum Memiliki Akun
1	Bappeda Provinsi	34	9	25
2	Air Minum Provinsi	34	23	11
3	Air Limbah Provinsi	34	16	18
4	Perumahan Provinsi	34	25	9
5	Bappeda Kab/Kota	508	137	371
6	Air Minum Kab/Kota	508	283	225
7	Air Limbah Kab/Kota	508	261	247

Dengan adanya aplikasi SICALMERS diharapkan dapat memudahkan Dinas Teknis kabupaten/kota dan provinsi dalam melaporkan capaian penerapan SPM

PUPR, memudahkan Bappeda kabupaten/kota dan provinsi dalam memverifikasi data capaian penerapan SPM PUPR, memudahkan pemerintah pusat dalam melaks-

nakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM PUPR, serta tersusunnya satu data terkait capaian penerapan SPM PUPR \*



Pembukaan updating Pelaporan bidang Perkim Santika Tangsel 2021 oleh Kepala Pusat FID dan Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman



## **UPDATING PELAPORAN DAK BIDANG AIR MINUM, SANITASI, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBAGAI SALAH SATU DASAR PENGALOKASIAN DAK**

Oleh : Leviana Okvianty, Pujiati Rahayu

**P**enyelenggaraan DAK dari tahun ke tahun mengalami perubahan dinamika kebijakan dan perkembangan yang signifikan baik dari besaran alokasi, cakupan bidang dan menu kegiatan yang didanai, maupun jumlah penerima dana. Perkembangan input dana ini diharapkan berbanding lurus dengan output, outcome, dan impact yang dihasilkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan DAK perlu dipantau perkembangannya dan dievaluasi keberhasilannya demi meningkatkan kinerja perangkat daerah dan efisiensi penggunaan DAK dalam mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan amanah Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 Pasal 8 yakni Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK

Fisik yang terdiri atas laporan : realisasi penyerapan dana, capaian keluaran kegiatan (output), pelaksanaan teknis kegiatan, dan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) DAK. Realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya. Selaras dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 7 bahwa pelaporan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penilaian teknis. Hasil penilaian teknis tersebut digunakan sebagai alat ukur menentukan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan DAK Air Minum, Sanitasi dan Perumahan yang menjadi salah satu dasar pengalokasian DAK. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dapat tertib dalam

melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan.

Capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) DAK menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik TA.2023. Laporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) DAK ini disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pemenuhan target / sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) diatur dalam lampiran petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional masing-masing bidang DAK Fisik. Untuk Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan konsep capaian hasil jangka pendek (im-



Verifikasi oleh verifikator Bidang Air Minum, sanitasi, dan Permukiman

mediate outcome) DAK tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini merupakan hal yang baru sehingga perlu diinformasikan lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam proses pemantauan evaluasi DAK, khususnya DAK Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian PUPR melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah melaksanakan acara Updating Pelaporan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman Sebagai Dasar Pengalokasian DAK. Tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui progress pelaporan pemerintah daerah penerima alokasi DAK TA. 2020 dan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah yang belum melaporkan, mengingatkan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan DAK TA. 2021 sebelum batas waktu akhir penyaluran tahap 1 berakhir, serta memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pemerintah daerah terkait tata cara pengukuran dan penginputan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) DAK.

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan acara Updating Pelaporan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman Sebagai Dasar Pengalokasian DAK yang dibagi kedalam 3 wilayah, yaitu:

1. Wilayah Barat pada 21-22 Juni 2021;
2. Wilayah Tengah pada 28-29 Juni 2021;
3. Wilayah Timur pada 30 Juni-1 Juli 2021;

Acara ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yang diawali dengan arahan dan pembukaan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, dan dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PUPR. Pada siang dilaksanakan sesi coaching clinic mengenai tata cara pengukuran dan penginputan Immediate Outcome DAK pada E-Monitoring DAK dengan pembicara dari Pu-

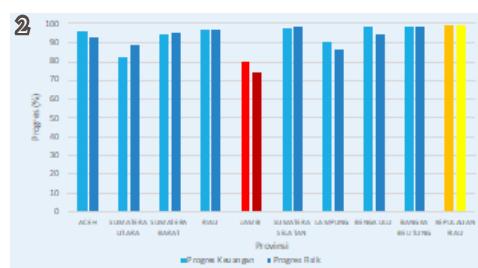
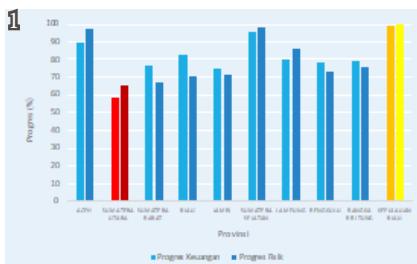
sat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Setelah itu dilaksanakan sesi desk terkait pengecekan progress pelaporan DAK TA. 2020, progress pelaksanaan TA. 2021, dan pemahaman terhadap Immediate Outcome DAK kepada SKPD kabupaten/kota yang hadir langsung maupun daring menggunakan aplikasi Zoom yang dilanjutkan hingga hari kedua. Peserta pada acara ini adalah Balai Prasarana Permukiman Wilayah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD pengampu air minum, sanitasi, dan perumahan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

A. Progress Pelaporan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman TA. 2020

DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman yang telah disalurkan dananya di tahun 2020 belum seluruhnya dilaporkan penyerapannya. Berikut ini merupakan hasil rekap pelaporan oleh pemerintah daerah per-wilayah.

**PELAPORAN PROGRESS KEUANGAN & FISIK DAK  
BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN PER-PROVINSI**

**WILAYAH BARAT TA. 2020**

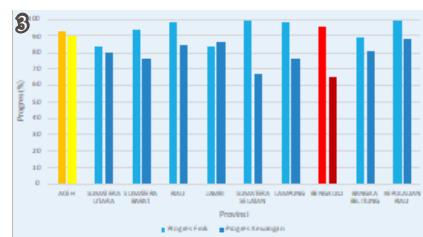


1. Bidang Air Minum

2. Bidang Sanitasi

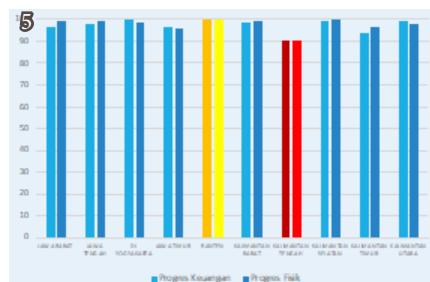
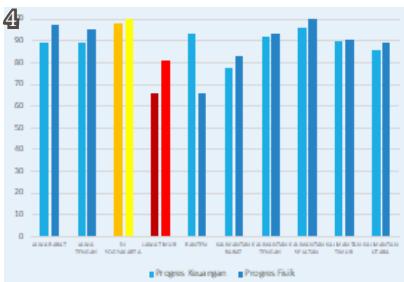
3. Bidang Perumahan dan Permukiman

Sumber : e-Monitoring DAK Per tanggal 17 Juni 2021



Berdasarkan grafik diatas, pelaporan progress terbaik pada DAK TA. 2020 untuk bidang air minum dan sanitasi ialah Provinsi Kepulauan Riau dan untuk bidang perumahan ialah Provinsi Aceh, sedangkan pelaporan terendah pada DAK TA. 2020 untuk bidang air minum ialah Provinsi Sumatera Utara, untuk bidang Sanitasi ialah Provinsi Jambi, dan untuk bidang perumahan dan permukiman ialah Provinsi Bengkulu.

**WILAYAH TENGAH TA. 2020**

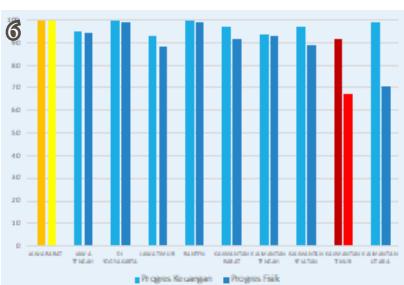


4. Bidang Air Minum

5. Bidang Sanitasi

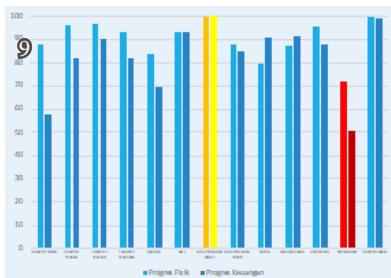
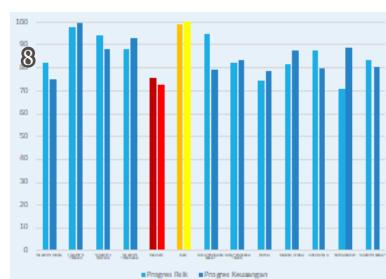
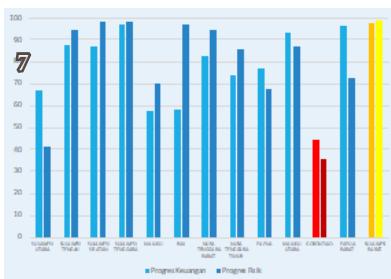
6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Sumber : e-Monitoring DAK Per tanggal 24 Juni 2021



Berdasarkan grafik diatas, pelaporan progress terbaik pada DAK TA. 2020 untuk bidang air minum ialah Provinsi DIY, untuk bidang sanitasi ialah Provinsi Banten, dan untuk bidang perumahan ialah Provinsi Jawa Barat, sedangkan pelaporan terendah pada DAK TA. 2020 untuk bidang air minum ialah Provinsi Jawa Timur, untuk bidang Sanitasi ialah Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk bidang perumahan dan permukiman ialah Provinsi Kalimantan Timur.

WILAYAH TIMUR TA. 2020



7. Bidang Air Minum
  8. Bidang Sanitasi
  9. Bidang Perumahan dan Permukiman

Sumber : e-Monitoring DAK Per tanggal 24 Juni 2021

Berdasarkan grafik diatas, pelaporan progress terbaik pada DAK TA. 2020 untuk bidang air minum ialah Provinsi Sulawesi Barat, untuk bidang sanitasi ialah Provinsi Bali, dan untuk bidang perumahan ialah Nusa Tenggara Barat, sedangkan pelaporan terendah pada DAK TA. 2020 untuk bidang air minum ialah Provinsi Gorontalo, untuk bidang Sanitasi ialah Provinsi Maluku, dan untuk bidang perumahan dan permukiman ialah Provinsi Papua Barat

Rekap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terbaik pada Pelaporan DAK Ta. 2020

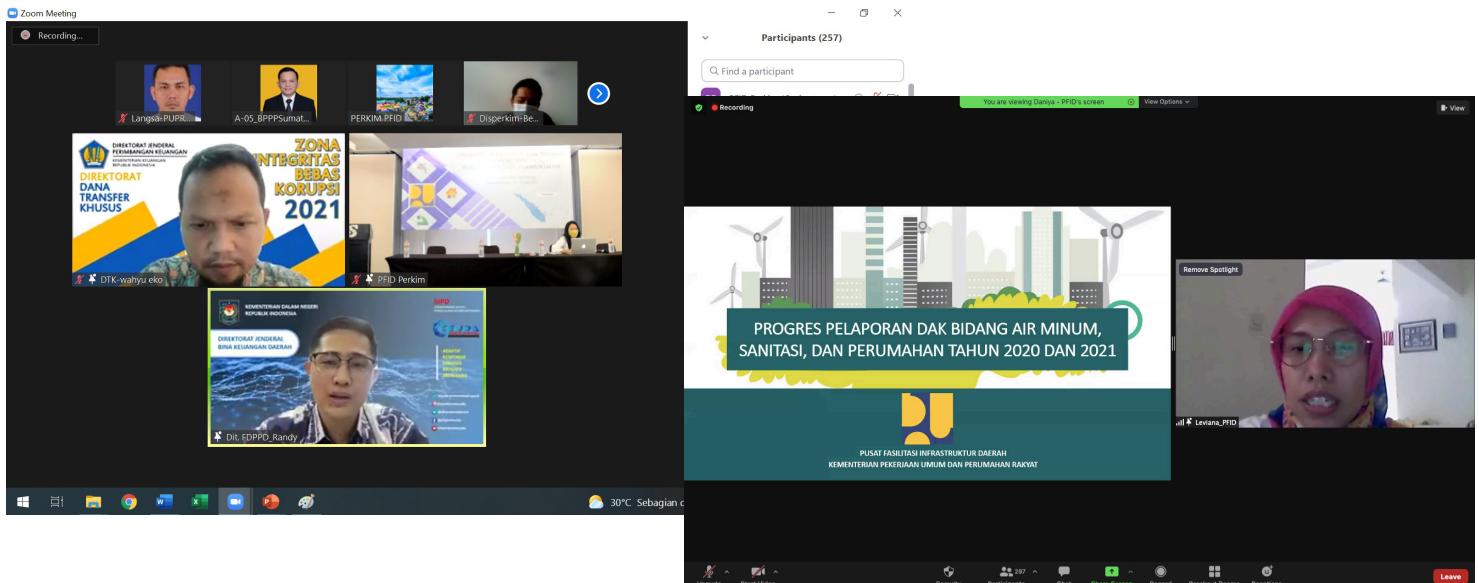
Wilayah	Bidang Air Minum	Bidang Sanitasi	Bidang Perumahan
Barat	1. Bener Meriah 2. Humbang Hasundutan	1. Ogan Komering Ilir 2. Aceh Tenggara	1. Lampung barat 2. Pesisir Barat
Tengah	1. Kab. Tapin 2. Kab. Sleman	1. Wonosobo 2. Banyumas	1. Landak 2. Lebak
Timur	1. Mamasa 2. Jeneponto	1. Lombok Timur 2. Jeneponto	1. Bima 2. Sumbawa

Sumber : e-monitoring DAK per tanggal 17 Juni 2021

Rekap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terburuk pada Pelaporan DAK TA. 2020

Wilayah	Bidang Air Minum	Bidang Sanitasi	Bidang Perumahan
Barat	1. Serdang Bedagai 2. Indragiri Hulu	1. Tanjung Jabung Timur 2. LimaPuluh Kota	1. Nias Barat 2. LimaPuluh Kota
Tengah	1. Kab. Serang 2. Kota Serang	1. Kab. Bekasi 2. Kab. Jember	1. Kota Samarinda 2. Kab. Gunung Kidul
Timur	1. Tojo Una-Una 2. Kab. Dogiyai	1. Kab. Sorong 2. Kab. Tojo Una-Una	1. Kab. Nduga 2. Kab. Tambräu

Sumber : e-monitoring DAK per tanggal 17 Juni 2021



Setelah dilakukan sesi desk, diketahui bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan dan melaporkan kegiatan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman TA. 2020 diantaranya sebagai berikut :

Kendala Teknis Pelaksanaan	Kendala Pelaporan
<p>1. Keterlambatan lelang;</p> <p>2. Waktu yang terbatas sehingga pemda memutuskan kegiatan tidak dikerjakan semua;</p> <p>3. Untuk bidang perumahan ada beberapa pemda yang tidak bisa melaksanakan pembangunan fisik 100 % karena dua hal yaitu calon penerima bantuan meninggal atau tidak bersedia berswadaya, sedangkan sudah tidak ada waktu untuk mencari pengganti penerima bantuan; dan</p> <p>4. Baik di bidang air minum maupun sanitasi terdapat kegiatan yang belum selesai hingga tahun 2021, dan berpotensi adanya temuan karena DAK tidak dapat dilakukan secara multiyears.</p>	<p>1. Pergantian petugas e-monitoring DAK;</p> <p>2. Kurangnya pemahaman petugas e-monitoring DAK;</p> <p>3. Ada kendala di aplikasi yang error karena instalasi tidak sempurna; dan</p> <p>4. SP2D sebagai dasar pelaporan belum diberikan oleh bagian keuangan.</p>

B. Progress Pelaksanaan DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman TA. 2021

Berdasarkan data dari OM-SPAN, masih diperlukan upaya percepatan penyampaian data kontrak di TA.2021 karena kontrak untuk Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan dan Permukiman yang telah disampaikan belum mencapai 50% dari pagu. Jika melewati batas waktu penyaluran tahap I maka dana yang dialokasikan akan hangus. Kendala penyaluran DAK Fisik TA. 2021 ini

disebabkan beberapa hal, yaitu :

1. Keterlambatan proses PBJ;
  - a. Menunggu penetapan DPA/ Revisi DPA
  - b. Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan
  - c. Jenis barang yang akan dibeli tidak muncul/terlambat muncul dalam e-katalog
2. Reviu APIP yang memakan waktu cukup lama. Beberapa daerah membutuhkan waktu sampai 30 hari untuk menunggu hasil review APIP. Hal ini disebabkan salah satunya keterbatasan dari tenaga APIP di daerah;
3. Adanya perubahan nomenklatur di SIPD, terutama untuk bidang sanitasi, air minum, dan perumahan;
4. Adanya perubahan peraturan terkait KPA, PA, PPK dr kemandagri, sehingga kontraknya menunggu PPK yang baru; serta
5. Adanya kebijakan di beberapa KPPN yang harus menunggu semua bidang masuk kontrak dan disetujui, baru dapat dilurkan.

### C. Immediate Outcome DAK

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, acara ini sekaligus memberikan informasi kepada pemerintah daerah bahwa setelah pembangunan infrastruktur DAK TA. 2021 selesai dilaksanakan, pemerintah daerah wajib melaporkan capaian hasil jangka pendek (Immediate Outcome) DAK. Capaian tersebut paling lambat dilaporkan

pada bulan Maret Tahun 2022 sebagai salah satu dasar pengalokasian DAK TA. 2023. Hal tersebut telah tercantum pada Perpres Nomor 123 Tahun 2020 dan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2021. Capaian ini akan disampaikan melalui aplikasi masing-masing K/L yang terinterkoneksi dengan KRISNA DAK, bagi DAK Infrastruktur PUPR aplikasi yang dimaksud adalah e-monitoring DAK. Capaian im-

mediate outcome diisi berdasarkan hasil survei rumah tangga. Survei rumah tangga ini dibutuhkan untuk memastikan apakah pembangunan telah sesuai dengan aspek mutu, dan digunakan sepenuhnya oleh penerima manfaat. Berikut ini merupakan form kuesioner masing-masing bidang :

1	No	Nama Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi			Kegiatan			Data Survei (1 = Memenuhi, 0 = Tidak Memenuhi)								Analisis						Final Outcome
				Kecamatan	Desa	Menu	Rincian	Bumber Air	Kuantitas	Kualitas	Kontinuitas	Keberjangkauan	Keberjangkauan Lo Nego	Ketarifan	Bumber Air	Kuantitas	Kualitas	Kontinuitas	Keberjangkauan	Keberjangkauan Lo Nego	Ketarifan			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
													0	0	0	0	0	0	0	0				
													0	0	0	0	0	0	0	0				
													0	0	0	0	0	0	0	0				
													Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total				
2	No	Nama Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi			Kegiatan			Data Survei (1 = Memenuhi, 0 = Tidak Memenuhi)								Analisis						Final Outcome
				Kecamatan	Desa	Menu	Rincian	Penggunaan	Jenis Kloset	Pengolahan AL	Pengolahan LT	Penggunaan	Jenis Kloset	Pengolahan AL	Pengolahan LT	12	13	14	15	16				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total					
3	No	Nama Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi			Kegiatan			Data Survei (1 = Memenuhi, 0 = Tidak Memenuhi)								Analisis						Final Outcome
				Kecamatan	Desa	Menu	Rincian	Layanan	Pemilahan	Iuran	Ekonomi	Layanan	Pemilahan	Iuran	Ekonomi	12	13	14	15	16				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											TOTAL	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total					
4	No	Nama Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi			Kegiatan			Data Survei (1 = Memenuhi, 0 = Tidak Memenuhi)								Analisis						Final Outcome
				Kecamatan	Desa	Menu	Rincian	Ketahanan Bangunan	Kekurukan Luas	Akses Air Minum	Akses Sanitasi	Ketahanan Bangunan	Kekurukan Luas	Akses Air Minum	Akses Sanitasi	12	13	14	15	16				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total					
5	No	Nama Penerima Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Lokasi			Kegiatan			Data Survei (1 = Memenuhi, 0 = Tidak Memenuhi)								Analisis						Final Outcome
				Kecamatan	Desa	Menu	Rindan	Ketahanan Bangunan	Kekurukan Luas	Akses Air Minum	Akses Sanitasi	Akses Lekirik	Jalan Lingkungan	Drainase Lingkungan	Ketahanan Bangunan	Kekurukan Luas	Akses Air Minum	Akses Sanitasi	Akses Lekirik	Jalan Lingkungan	Drainase Lingkungan			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											0	0	0	0	0	0	0	0	0					
											Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total					

1. Form Kuesioner Bidang Air Minum
2. Form Kuesioner Bidang Sanitasi - Air Limbah
3. Form Kuesioner Bidang Sanitasi - Persampahan
4. Form Kuesioner Bidang Perumahan - Rumah Swadaya
5. Form Kuesioner Bidang Perumahan - Rumah Khusus

Setelah pengisian kuesioner rumah tangga selesai dilakukan, maka pemerintah daerah harus menganalisis dan menginput hasilnya ke dalam e-monitoring DAK. Hasil penginputan tersebut akan menunjukkan kinerja pemerintah

daerah yang akan dijadikan sebagai salah satu dasar penilaian terhadap pengalokasian tahun berikutnya. Diharapkan dengan adanya pelaporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) DAK ini akan mendorong pemerintah daerah untuk kedepannya dapat

lebih baik dalam membangun infrastruktur secara sungguh-sungguh sehingga infrastruktur tersebut dapat berfungsi secara optimal dan digunakan secara berkelanjutan oleh penerima manfaat \*



## EVALUASI SAKIP UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN ANGGARAN 2020

Oleh : Riza Hamidah

**D**alam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri PUPR No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian PUPR, perlu dilakukan evaluasi SAKIP setiap entitas yang bertujuan untuk a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP b) Menilai tingkat implementasi SAKIP c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP d) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pada tanggal 27-28 Mei 2021 bertempat di Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman di Bandung, telah dilaksanakan Evaluasi SAKIP Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2020 yang dihadiri oleh para Tim evaluator SAKIP sesuai SK Nomor 16/KPTS/BPAKLN/V/2021 tentang Tim Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal. Para evaluator telah mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis tentang SAKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP dari Inspektorat Jenderal.

Narasumber pada acara ini yaitu auditor ahli muda Ir. Sasmito Wihantoro, MA dari Tim Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang menyampaikan Paparan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sesuai Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 dengan penjelasan terkait dasar hukum evaluasi, tujuan evaluasi, ruang lingkup evaluasi, tahap evaluasi (persiapan, pelaksanaan dan pelaporan) serta diskusi terkait pengisian Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan Kertas Kerja Evaluasi (KKE).

Narasumber selanjutnya yaitu Kepala Bidang Keterpaduan Program, Pusat Infrastruktur Wilayah



Nasional Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional yang menyampaikan paparan Penyelenggaraan SAKIP Kementerian PUPR Tahun 2020 dengan penjelasan terkait dasar hukum, ruang lingkup, resume penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal serta tingkat ketertiban upload dokumen kinerja ke dalam eSAKIP.

Hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2019 menempati urutan kedua di tingkat Unit Organisasi dengan nilai 79,86 (BB). Beberapa catatan dari tim evaluator Inspektorat Jenderal atas hasil evaluasi Tahun 2019 yaitu:

- a) komponen pengukuran kinerja
- Menyusun SKP sesuai dengan SKP atasan;
  - melaksanakan rekomendasi rencana aksi;
  - Menyusun Reward and Punishment.



b) komponen pelaporan kinerja yaitu menyampaikan informasi yang jelas seperti adanya indikator yang direkomendasikan untuk diperbaiki pada periode sebelumnya namun tetap tidak ada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya

c) Komponen evaluasi internal

- melakukan sertifikasi terhadap tim evaluasi yang belum memiliki sertifikat;
- melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai lampiran VI Permen PUPR Nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di PUPR terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Rekomendasi tersebut hampir seluruhnya telah ditindaklanjuti terutama terkait Laporan monev

kinerja Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perbaikan indikator kinerja di dalam Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024.

Adapun evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2020 merupakan tahun pertama untuk periode perencanaan 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator baru yang SMART sesuai Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, ada beberapa poin penilaian LKE yang harus disepakati sehingga evaluator mempunyai pemahaman yang sama dengan bimbingan dari evaluator Inspektorat Jenderal.

Sebelumnya, Surat Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Nomor PR.03.04-Sr/238 tanggal 30 April 2020 hal Laporan Hasil Evaluasi



TIM PFID pada acara evaluasi SAKIP Unit Kerja Tahun Anggaran 2020

SAKIP Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah tahun 2019 menyatakan bahwa implementasi atas SAKIP Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah mendapatkan nilai 72,94 dengan kategori BB (Sangat Baik) yang artinya akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perubahan sesuai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP. Tahun 2019 merupakan tahun 1 (pertama) bagi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam menyelenggarakan SAKIP sebagai Unit Kerja baru di Sekretariat Jenderal. Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan terhadap rekomendasi dari tim evaluator sehingga optimis hasil evaluasi SAKIP Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah tahun 2020 akan meningkat dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen Perencanaan Kinerja: Indikator dalam Renstra Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Tahun 2020-2024 telah mencerminkan tugas dan fungsi serta kinerja di lingkungan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah serta menggunakan indikator yang SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Timebound).
- 2) Komponen Pengukuran Kinerja: Indikator dalam Renstra Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Tahun 2020-2024 telah berorientasi hasil (outcome) dengan metode pengukuran
  - a) tingkat kualitas perencanaan;
  - b) tingkat kualitas pembinaan;
  - c) tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi;
  - d) tingkat capaian SPM.
- 3) Komponen Kriteria Pelaporan Kinerja: indikator kinerja hanya 1 (satu) namun meliputi seluruh bidang serta informasi kinerja terlihat dari laporan monev kinerja bulanan dan buletin PFID triwulanan.
- 4) Komponen Evaluasi internal: telah dilakukan monev kinerja bulanan di tahun 2020 untuk mencatat permasalahan dan keberhasilan yang dicapai
- 5) Komponen Pencapaian sasaran/kinerja organisasi: diperlukan inovasi dalam penilaian kinerja untuk meningkatkan kualitas kinerja yaitu dengan pertemuan atau rapat secara daring maupun hybrid (daring dan luring) untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan sehingga target kinerja dapat tercapai.

#### Rekomendasi kebijakan:

Adanya komitmen pimpinan yang kuat dan keterlibatan seluruh pegawai di lingkungan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dalam rangka pelaksanaan manajemen kinerja di tengah issue pandemic COVID-19, maka target kinerja optimis dapat tercapai bahkan mengalami peningkatan dengan dilakukan inovasi berupa pertemuan atau rapat secara daring maupun hybrid (daring dan luring) terutama untuk pelayanan eksternal yaitu ke Pemerintah Daerah sehingga pada akhirnya stakeholder puas atas kinerja Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah \*



## CAPAIAN MANFAAT PENGELOLAAN DAK WILAYAH BARAT DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Oleh : Indra Jaya KGP

**P**usat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) melalui Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah (Perencanaan FID) terus menerus melaksanakan penyusunan, koordinasi dan pembinaan teknis keterpaduan perencanaan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur daerah. Dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR pasal 22 terkait Pemantau-

an dan Evaluasi, bidang Perencanaan FID melaksanakan Monitoring Evaluasi berbasis output

dan outcome di wilayah Sumatera Barat pada tanggal 8-10 Juni 2021.



Pengambilan video wawancara pemilik warung di sekitar lokasi Infrastruktur Bidang Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan



Pengambilan video testimoni masyarakat terkait manfaat DAK mendukung Program Prioritas Nasional di KSPN Mandeh



Monitoring Program Hibah Jalan Daerah antara Kepala Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama dengan Pemda Setempat



Pengambilan video testimoni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan terkait manfaat DAK mendukung Program Prioritas Nasional di KSPN Mandeh

Output dari kegiatan ini adalah video dokumentasi hasil pelaksanaan DAK TA. 2020 Bidang Jalan dan Jembatan; Bidang Irigasi; Bidang Air Minum; Bidang Sanitasi; dan Bidang Perumahan. Tim Capaian Manfaat Pelaksanaan DAK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah wilayah Sumatera Barat mengunjungi beberapa titik lokasi Infrastruktur DAK dan PHJD TA. 2020 diantaranya DAK Bidang Jalan dan PHJD Mandeh; DAK Bidang Jalan dan PHJD Kabupaten Pesisir Selatan; DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, dan DAK Bidang Perumahan yang berada di Kota Payakumbuh.

Dalam pelaksanaan kegiatan Monev wilayah barat ini, Tim Capaian Manfaat Pelaksanaan DAK tidak hanya mewawancara OPD sebagai pelaksana kegiatan DAK, namun juga mewawancara penerima manfaat langsung dari Infrastruktur DAK mulai dari pengguna jalan, pemilik warung di sekitar Infrastruktur DAK Jalan, petani dan warga sekitar Infrastruktur Bidang Irigasi, maupun Bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Perumahan.



Pengambilan video dengan Dinas PUPR Kota Payakumbuh

Salah satu yang tim wawancara adalah pemilik warung di sekitar lokasi Infrastruktur Bidang Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan, beliau menuturkan bahwa sebelum adanya perbaikan jalan disekitar sini, sedikit sekali pengguna kendaraan melewati lokasi dikarenakan kondisi jalan yang kurang memadai untuk dilewati oleh kendaraan bermotor. Namun setelah adanya perbaikan jalan, banyak sekali kendaraan yang melewati jalan tersebut dan membuat aktivitas ekonomi disekitar lokasi DAK Jalan menjadi ramai.

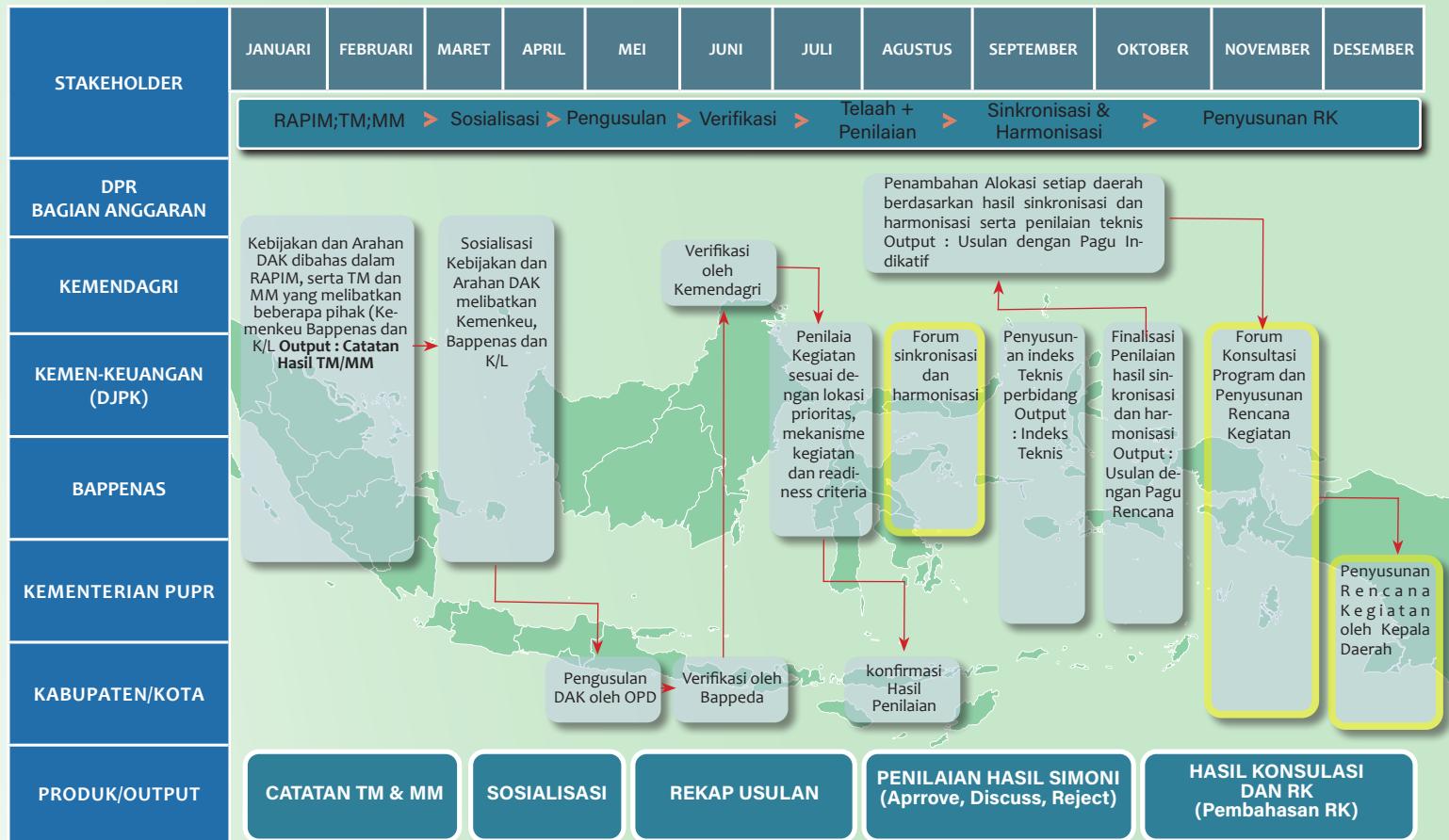
Selain mewawancara pedagang, Tim Capaian Manfaat Pe-

laksanaan DAK juga melakukan wawancara dengan masyarakat penerima sambungan rumah dari pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum. Salah satu warga menuturkan bahwa sebelum mendapatkan bantuan, ia memakai sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan memasak. Permasalahannya adalah apabila musim hujan, air menjadi keruh. Selain itu warga juga harus menimba untuk mengambil air dari sumur, dan apabila musim kemarau membuat sumur menjadi kering. Setelah ada bantuan, air untuk memenuhi kebutuhan warga dapat diakses melalui keran yang disediakan dengan spesifikasi kualitas air

bagus dan debit air yang dihasilkan sebesar 2 liter per detik.

Selain mewawancara penikmat manfaat pelaksanaan DAK dibidang Jalan dan bidang Air Minum, Tim Capaian Manfaat Pelaksanaan DAK juga mewawancara masyarakat penerima tangki septik Individu. Sebelum dilaksanakan kegiatan DAK, para warga BAB sembarangan, namun setelah adanya kegiatan DAK pembangunan tangki septic individu, warga teratur untuk BAB di penampungan septic yang telah dibangun dan tidak mencemari lingkungan \*

## MEKANISME PERENCANAAN ANGGARAN DAK T-1



## MEKANISME RINGKAS PELAKSANA DAK T-0

